

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan program KB bagi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan program KB bagi KPS dan KS-I di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan:

###### a. Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Program

Terjadi perubahan sikap, pola pikir (*mindset*) dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB meskipun belum secara keseluruhan.

###### b. Keberhasilan atau Kegagalan Program

###### 1) Advokasi dan KIE

Terdapat beberapa dalam hal sumber daya, baik tenaga, dana, dan sarana pendukung informasi.

###### 2) Pelayanan

Pelayanan oleh petugas kesehatan dan kader KB belum sepenuhnya diberikan sesuai standar dan prosedur.

###### 3) Pembiayaan

Pembiayaan program KB diperuntukan bagi kegiatan pelayanan ditingkat dasar maupun lanjutan.

###### 4) Pembinaan

Pembinaan yang dipahami para pelaksana baik BKKB-PP maupun tim pokja adalah pembinaan internal dan eksternal.

c. Tujuan atau Sasaran dari Program atau Kebijakan

Tujuan umum maupun khusus dari program KB bagi KPS dan KS-I belum sepenuhnya tercapai.

**2. Dampak program KB bagi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan program KB bagi KPS dan KS-I di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa program KB bagi KPS dan KS-I gagal menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended consequences*). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Masalah publik tidak mungkin diselesaikan, penyampaian informasi yang kurang maksimal mengakibatkan kurangnya pemahaman keluarga miskin akan program KB.
- 2) Sumber daya yang tidak memadai, baik kurangnya sumber daya manusia (jumlah PLKB), dana dan sarana pendukung penyampaian informasi.
- 3) Cara pengimplementasian yang tidak tepat, pelaksana pelayanan baik tenaga medis maupun tim pokja belum melaksanakan pelayanan sesuai prosedur.
- 4) Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan, masalah biaya dalam persalinan membuat adanya program Jampersal justru bertolak belakang dengan program KB.

- 5) Tidak berjalannya usaha-usaha peningkatan perekonomian keluarga, program UPPKS khusus bagi KPS dan KS-I yang termasuk dalam peserta KB aktif justru tidak berjalan.
- 6) Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor saja, masalah KB bagi keluarga miskin hanya dipahami dalam hal biaya, akan tetapi masih ada masalah lain seperti *unmeet need*.

Program KB bagi KPS dan KS-I di Kota Bandar Lampung juga menghasilkan dampak tidak diharapkan (*unintended consequences*), yaitu:

- 1) Masih terdapat KPS dan KS-I yang tidak memanfaatkan tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah dan memilih memperoleh pelayanan KB di Bidan atau klinik swasta.
- 2) KPS dan KS-I cenderung lebih banyak menggunakan jenis kontrasepsi jangka pendek, misalnya KB suntik dan KB pil yang dirasa lebih nyaman digunakan.
- 3) Pasca intervensi program KPS dan KS-I masih tertarik untuk menambah jumlah anak dalam keluarga, dikarenakan semua keputusan dalam keluarga diserahkan kepada suami dan adanya program Jampersal yang dianggap meringankan biaya persalinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya penambahan jumlah PLKB oleh BKKB-PP Kota Bandar Lampung dengan BKKBN Provinsi Lampung untuk mendukung penyebaran informasi KB khususnya bagi KPS dan KS-I. Penambahan perlu diimbangi dengan pelatihan kader agar melaksanakan tugas sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Selain itu, BKKB-PP Kota Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan sekaligus menerapkan aturan dan sanksi bagi kader maupun tenaga medis yang melanggar ketentuan pelayanan.
2. Menggiatkan kegiatan KIE agar KPS dan KS-I mendapatkan informasi yang lengkap tentang program KB. Perlu adanya inovasi dalam kegiatan sosialisasi KB bagi KPS dan KS-I, seperti penambahan sarana informasi di tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, perlu disediakan ruang konseling. Terserap dengan benar dan lengkap akan meningkatkan pemahaman PUS mengenai KB dan merencanakan jumlah anak.
3. BKKB-PP Kota Bandar Lampung perlu juga untuk mengembangkan kembali program peningkatan perekonomian keluarga miskin. Membangkitkan kembali program UPPKS dengan bekerjasama dengan peminjam modal (Bank).
4. Perlunya dilakukan koordinasi ulang antara BKKB-PP dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membantu mensosialisasikan program KB, perlu dijelaskan dengan lengkap mengenai kata “gratis” dalam program Jampersal. Sehingga sosialisasi Jampersal seimbang dengan sosialisasi KB.